

# JURNAL KAJIAN BALI

*Journal of Bali Studies*

p-ISSN 2088-4443 # e-ISSN 2580-0698  
Volume 09, Nomor 02, Oktober 2019  
<http://ojs.unud.ac.id/index.php/kajianbali>

---

Terakreditasi Sinta-2, SK Dirjen Penguatan Riset dan  
Pengembangan Kemenristekdikti No. 23/E/KPT/2019

---



Pusat Kajian Bali dan Pusat Unggulan Pariwisata  
Universitas Udayana

# Wacana KB *Krama* Bali : Analisis Persepsi Warganet di Media Sosial Facebook

I Made Sarmita

Universitas Pendidikan Ganesha

Email: [made.sarmita@undiksha.ac.id](mailto:made.sarmita@undiksha.ac.id)

## Abstract

### ***KB Krama Bali* Discourse: Analysis of Netizen Perception In Facebook Social Media**

This study aims to determine the netizen perceptions related to Balinese family planning (KB *Krama Bali*) discourse on Facebook. Unlike general principle of family planning in Indonesia which limit family to have two children, in Bali the allowing number is four. To achieve the study objective, the method used is qualitative. The study show that: 1) There are variations in the coverage of the KB *Krama Bali* discourse on Facebook by several online media, seen from the title and intensity of the news. The variety of news coverage is inseparable from the internal policies and external influences of the media; 2) Most of the attitude of netizens towards the KB *Krama Bali* discourse is agree (47%). This shows that some of the netizens were enthusiastic about the existence of the KB *Krama Bali*, indicating that Balinese cultural values have a more important role than other values related to child ownership; 3) Netizens expectations of the KB *Krama Bali* discourse vary, but only 3 things stand out, namely no further expectations, incentives, and priorities in other programs. From this expectation, it is identified that economic and cultural values have a vital role in children's values.

**Keywords:** KB *krama Bali*, perception, social media, facebook

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi warganet terkait wacana KB *Krama Bali* pada media sosial *facebook*. Berbeda dengan prinsip KB Indonesia yang membatasi kelahiran pada dua anak, KB *Krama Bali* mengizinkan untuk empat anak. Untuk mencapai tujuan tersebut, metode yang digunakan

adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Terdapat variasi pemberitaan wacana KB Krama Bali di media sosial *facebook* oleh beberapa media masa online, dilihat dari judul dan intensitas pemberitaannya. Bervariasinya pemberitaan wacana ini tidak terlepas dari kebijakan internal dan pengaruh eksternal media; 2) Sikap warganet terhadap wacana KB Krama Bali sebagian besar adalah setuju (47%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian dari warganet antusias akan adanya KB Krama Bali, mengindikasikan nilai-nilai budaya Bali memiliki peranan yang lebih penting dibandingkan dengan nilai lainnya terkait kepemilikan anak; 3) Harapan warganet terhadap wacana KB Krama Bali bervariasi, namun yang mencolok hanya tiga hal yaitu tidak ada harapan lebih lanjut, pemberian insentif, dan prioritas pada program lain. Dari harapan ini teridentifikasi bahwa nilai ekonomi dan budaya memiliki peranan vital akan nilai anak.

**Kata Kunci:** KB krama Bali, persepsi, media sosial, facebook

## 1. Pendahuluan

Indonesia masih menghadapi masalah terkait ketidakseimbangan antara jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Berdasarkan data terakhir, Indonesia menempati peringkat ke-4 di dunia dalam hal jumlah penduduk, namun kualitas manusianya yang diukur melalui capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), masih menempati peringkat ke-116 dari 187 negara (UNDP, 2018). Secara kuantitas, Indonesia akan menyongsong momentum Bonus Demografi, namun secara kualitas Indonesia dibayangi oleh Bencana Demografi (Sarmita, 2017). Untuk mengurai permasalahan tersebut, telah dilaksanakan secara bersamaan pembangunan di segala bidang termasuk keluarga berencana (KB).

KB dalam pengertian sempit merujuk kepada penggunaan metode kontrasepsi oleh suami-istri atas persetujuan bersama, untuk mengatur kelahiran dengan tujuan untuk menghindari permasalahan kesehatan (seksual dan reproduksi), kemasyarakatan, ekonomi, dan untuk memungkinkan mereka memikul tanggungjawab terhadap anak-anaknya dan masyarakat (Rohim, 2016 dan Handayani, 2012).

KB dalam pengertian tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut: (1) menjarangkan anak untuk memungkinkan menyusui dan penjagaan kesehatan ibu dan anak; (2) pengaturan masa hamil agar terjadi pada waktu yang aman; (3) mengatur jumlah anak, bukan saja untuk keperluan keluarga, melainkan juga untuk kemampuan fisik, finansial, pendidikan, dan pemeliharaan anak. Hal-hal yang disebutkan di atas mengindikasikan bahwa KB sesungguhnya adalah bagian dari kebijakan antenatal (Sutinah, 2017).

Pada masa Orde Baru, antara era 1970-an hingga 1990-an, program KB menjadi program pokok pemerintah, bahkan mutlak. Pada waktu itu, negara tampak begitu gencar menekan laju pertumbuhan penduduk. Dalihnya adalah pembangunan (*developmentalisme*). Atas nama pembangunan, negara berkepentingan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat (bangsa, negara) dinilai berhasil melaksanakan pembangunan bila pertumbuhan ekonominya cukup tinggi. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi (pembangunan) itu sendiri tidak akan memiliki makna dan fungsi jika populasi tidak terkendali. Artinya, sejauh apa pun kemakmuran, kekayaan sebagai hasil pembangunan, melimpahnya sumber daya alam (SDA), tidak akan ada artinya jika harus menanggung beban populasi yang tinggi.

Keluarga sebagai unit terkecil kehidupan bangsa diharapkan menerima norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera (NKKBS) yang berorientasi pada catur warga atau *zero population growth* (pertumbuhan seimbang) (Manuaba, 1998). Pemerintah sukses menjalankan program yang dimulai sejak tahun 1970-an itu. Kesuksesan Indonesia dalam melaksanakan program KB menjadi isu internasional, sehingga banyak negara lain yang belajar tentang bagaimana pelaksanaan program ini secara baik (Hull, 2010). Selain itu, Indonesia juga mendapat kehormatan sebagai tuan rumah Konferensi Internasional Keluarga Berencana (*International Conference of Family Planning*), pada tahun 1981. Dalam even tersebut, PBB memberikan penghargaan kepada Indonesia sebagai negara yang paling sukses dalam program KB (Rohim, 2016).

Keberhasilan program KB pada era Orde Baru ternyata tidak berlanjut ketika Indonesia memasuki era reformasi dan otonomi daerah. Segala sesuatu yang berbau Orde Baru yang identik dengan represi, absolutisme, totalitarianisme, penekanan di semua lini mendapat resistensi dari masyarakat. Reformasi seakan-akan menjadi momentum bagi masyarakat untuk bebas dalam berpikir, berekspresi, berpendapat, berbuat, hal-hal yang selama ini mereka rasakan hilang dalam ruang publik. Akibatnya sejak 2004, program KB dinilai berjalan lambat hingga angka kelahiran mencapai 4,5 juta per tahun dan pada tahun 2010 jumlah penduduk telah mencapai 237,6 juta jiwa (Herman, Rasyika, Rahmat, 2017).

Dalam menyikapi ajakan pemerintah untuk ikut program KB, sebagian masyarakat yang selama Orde Baru diam atau setidaknya “sembunyi-sembunyi” dalam menentang program tersebut, kini terang-terangan menunjukkan resistensinya. Jika dulu malu menentang program KB, malu memiliki anak banyak, kini tidak lagi, dengan berlindung di balik dalil budaya dan juga argumen Hak Asasi Manusia (HAM). Jadi, arus penolakan berbasis budaya yang diusung oleh sebagian masyarakat, selepas tumbanganya Orde Baru, seperti mendapatkan momentumnya karena memperoleh tambahan amunisi berupa argumen demokrasi, kebebasan, dan HAM.

Salah satu program KB berbasis budaya yang akhir-akhir ini kembali diwacanakan adalah KB Krama Bali. Konsep KB Krama Bali merujuk pada jumlah anak yang dimiliki dikaitkan dengan pemberian nama kepada masing-masing anak menurut pandangan budaya Bali (Foto 1 dan Foto 2). Anak pertama diberi nama “Wayan/ Putu”, anak kedua diberi nama “Made/Kadek”, anak ketiga diberi nama “Nyoman/Komang, anak keempat diberi nama “Ketut”, anak kelima dan seterusnya penamaannya kembali ke penamaan sesuai urutan dari awal.



Foto 1. Keluarga Bali dengan empat anak yang diwacanakan dewasa ini (Foto Dokumentasi Penulis)



Foto 2. Keluarga Bali tempo *doeloe*, lazim mempunyai empat anak atau lebih, kini dijuluki KB model Bali (Foto Dokumentasi Darma Putra).

Apabila mengikuti Program KB sesuai harapan Pemerintah Pusat yakni jumlah anak agar dapat dikontrol dengan slogannya “Dua Anak Cukup”, maka banyak pihak yang takut akan lunturnya kebudayaan yang sudah diwarisi secara turun-temurun dengan langkanya nama “Nyoman” dan “Ketut”. Hal tersebut didukung oleh pernyataan elit di daerah yang didasari oleh data rekapitulasi Kartu Keluarga Bali, ditemukan semakin langkanya keluarga Bali yang memiliki anak ketiga, keempat, dan seterusnya. Keseriusan elit di daerah terkait wacana ini secara jelas dituangkan dalam Instruksi Gubernur (Ingub) Bali Nomor 1545 Tahun 2019 tentang Sosialisasi Program KB Krama Bali. Dengan keluarnya Ingub ini berarti menghentikan kampanye dan sosialisasi KB 2 (dua) anak cukup yang selama bertahun-tahun telah dijalankan. Instruksi ini diharapkan bisa dijalankan oleh Bupati/Walikota se-Bali untuk bisa ditindaklanjuti oleh jajaran masing-masing terutama yang khusus menangani program KB. Selain itu, dikeluarkannya Ingub ini adalah sebagai salah satu aktualisasi dan pelaksanaan visi “*Nangun Sat kerthi Loka Bali*” melalui pembangunan semesta berencana menuju Bali Era Baru.

Terlepas dari sumber data yang digunakan untuk mengklaim semakin sulitnya menemukan keluarga Bali yang memiliki anak ketiga dan keempat termasuk Ingub yang telah dikeluarkan, keinginan untuk melaksanakan KB adalah hak asasi dari setiap pasangan yang telah memiliki pertimbangan masing-masing. Pada era digital saat ini, berbagai persepsi dilontarkan oleh warganet terkait dengan wacana KB Krama Bali dapat dilihat di berbagai media sosial.

Saat ini media sosial merupakan media komunikasi yang efektif, transparansi dan efisien serta memiliki peran penting sebagai agen perubahan dan pembaharuan. Media sosial menjadi fenomena yang makin mengglobal dan mengakar (Pradana, 2017). Penggunaan media sosial sebagai jembatan untuk membantu proses peralihan masyarakat yang tradisional ke masyarakat yang modern, khususnya untuk mentransfer informasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah kepada masyarakatnya. Sebaliknya masyarakat dapat menyampaikan informasi langsung kepada

pemerintah tentang berbagai hal terkait dengan pelayanan yang diterima (Rahadi, 2017).

Media sosial/*social media* atau yang dikenal juga dengan jejaring sosial merupakan bagian dari media baru (*new media*) (Ratnamulyani dan Beddy, 2018). Jelas kiranya bahwa muatan interaktif dalam media baru sangatlah tinggi (Santoso dkk, 2017). Media sosial didefinisikan sebagai sebuah media *online*, di mana para penggunaanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Media sosial *online* memiliki kekuatan sosial yang sangat mempengaruhi opini publik yang berkembang di masyarakat. Penggalangan dukungan atau gerakan massa sangat dipengaruhi kekuatan media *online* karena apa yang ada di dalam media sosial, terbukti mampu membentuk opini, sikap dan perilaku publik atau masyarakat (Watie, 2011).

Begitu kuatnya peranan media sosial menjadikan isu-isu terkini menjadi konsumsi publik dengan beragam opininya. Satu di antaranya adalah terkait dengan wacana KB Krama Bali yang disebarluaskan melalui media sosial dengan cepat mendapatkan tanggapan yang beragam dari berbagai kalangan. Segera setelah Gubernur Bali mengeluarkan pernyataan terkait KB Krama Bali, warganet dengan cepat bereaksi di media sosial. Banyak yang setuju, tidak setuju, skeptis terhadap program ini. Reaksi dalam bentuk persepsi dari warganet inilah yang perlu ditelaah dan dianalisis lebih lanjut yang sampai sejauh ini belum terurai secara tuntas. Untuk itu tulisan ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui secara mendalam persepsi warganet di media sosial terhadap isu KB Krama Bali yang diwacanakan oleh elit/pemerintah Provinsi Bali. Persepsi yang dimaksud adalah terkait sikap dan harapan warganet terhadap KB Krama Bali.

## 2. Metode

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Data yang digunakan bersumber dari opini warganet yang termuat pada media sosial *facebook*. Dipilihnya media sosial *facebook* karena media sosial ini



menjadi aplikasi yang paling banyak digemari di Indonesia yang jumlah penggunaannya telah mencapai 140 juta (Pertwi, 2019; Adji, 2019). Sumber berita yang disebarluaskan pada media sosial *facebook* adalah yang diunggah oleh media-media *online* dengan *rating* yang tinggi. Untuk mengkategorikan media-media *online* tersebut memiliki *rating* yang tinggi adalah didasarkan pemeringkatan oleh *google page rank* dan *alexa.com*.

*Google page rank* adalah situs berita *online* diurut berdasarkan jumlah *link* dan berkaitan dengan posisi suatu situs media *online* di mesin pencari *google*. *Alexa.com* adalah situs untuk mengetahui jumlah visitor terbanyak. Berdasarkan filterisasi dari dua media tersebut, diketahui bahwa situs-situs berita media *online* yang memiliki *rating* yang tinggi adalah: (1) *Balipost.com*, (2) *Nusabali.com*, (3) *Beritabali.com*, dan (4) *Metrobali.com*. Pada media-media *online* yang disebutkan tersebut dipilih berita-berita yang berkaitan dengan KB Krama Bali yang kemudian ditanggapi oleh warganet.

Tanggapan warganet untuk mengetahui persepsi terhadap isu yang ada, pengukurannya menggunakan tiga kategori yaitu, setuju, netral, dan tidak setuju. Untuk mengetahui harapan warganet dilihat dari ragam komentar yang ada, secara sengaja hanya akan dipilih komentar-komentar yang mengarah pada harapan warganet. Respon warganet yang tidak berkaitan dengan topik, dieliminasi oleh penulis. Analisis lebih lanjut dilakukan dengan teknik *crossstab* antara variabel sikap dan harapan warganet terhadap wacana KB Krama Bali. Sebelum mengulas dua hal tersebut, penulis terlebih dahulu menganalisis variasi konten berita terkait wacana KB Krama Bali di setiap situs yang telah disebutkan.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Variasi Pemberitaan Wacana KB Krama Bali di Facebook

Wacana KB Krama Bali menjadi perbincangan hangat dan menarik terutama di media sosial *facebook*. Wacana ini muncul terutama disampaikan oleh elit yang ada di Pemerintah Provinsi Bali. Seperti yang disadari, bahwa apa yang disampaikan oleh seorang tokoh/elit/kalangan yang begitu dikenal oleh publik akan

dengan cepat mendapat perhatian dari berbagai kalangan, salah satunya adalah pewarta yang siap memberitakan/memviralkan kepada khalayak banyak. Apa yang diberitakan, kemudian akan menjadi konsumsi publik, tidak jarang menimbulkan pro dan kontra terhadap apa yang diberitakan tersebut.

Terkait dengan KB Krama Bali, berdasarkan media-media *online* yang memberitakan dan kemudian *dishare* pada media sosial *facebook* secara garis besarnya dapat dikelompokkan menjadi dua masa, yakni masa sebelum dan setelah Pemilihan Gubernur Bali Tahun 2018. Media *online* yang memviralkan wacana KB Bali pada media sosial *facebook* sebelum pemilihan Gubernur Bali di tahun 2018 adalah *Nusa Bali* dengan 1 kali pemberitaan, dan *Metro Bali* dengan 2 kali pemberitaan. Sementara itu media *online* yang memviralkan wacana KB Bali pada media sosial *facebook* setelah pemilihan Gubernur Bali (akhir tahun 2018 sampai pertengahan tahun 2019) adalah *Bali Post* dengan 1 kali pemberitaan, dan *Berita Bali* dengan 5 kali pemberitaan. Untuk lebih jelasnya, intensitas pemberitaan dari media *online* yang kemudian diviralkan di media sosial *facebook* dapat dilihat pada Grafik 1.



Grafik 1. Intensitas Pemberitaan Wacana KB Krama Bali

Dari Grafik 1 terlihat bahwa media *online* *Bali Post* dan *Nusa Bali* memiliki intensitas pemberitaan yang paling rendah terhadap wacana KB Krama Bali, masing-masing dengan 1 kali pemberitaan,

sedangkan media *online Berita Bali* intensitas pemberitaannya paling tinggi yakni sebanyak 5 kali. Perbedaan intensitas pemberitaan ini tidak dapat dilepaskan dari teori Shoemaker-Reese yang menjelaskan pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap isi termasuk intensitas pemberitaan sebuah media. Teori ini menggambarkan bahwa isi media yang disampaikan kepada khalayak tidak datang dari “ruang hampa” yang netral, bebas kepentingan, dan disalurkan oleh medium yang bebas distorsi, namun merupakan hasil pengaruh kebijakan internal organisasi media dan pengaruh eksternal media itu sendiri. Pengaruh internal pada konten media berhubungan dengan kepentingan pemilik media, individu wartawan sebagai pencari berita, serta rutinitas organisasi media. Sedangkan faktor eksternal media berhubungan dengan pengiklan, pemerintah, masyarakat, dan lainnya. Dengan kata lain, isi media pada dasarnya merupakan hasil dari tekanan dari dalam dan luar organisasi media. Isi media termasuk intensitas pemberitaannya merupakan kombinasi dari program internal, keputusan manajerial dan editorial, serta pengaruh eksternal dari sumber-sumber nonmedia, seperti individu-individu yang berpengaruh secara sosial, pejabat pemerintah, pemasang iklan dan sebagainya (Krisdinanto, 2014).

Pada sisi judul berita yang ditampilkan oleh masing-masing media masa *online* yang menjadi fokus kajian ditemukan beberapa variasi. Namun demikian, esensi berita yang termuat secara garis besarnya adalah sama. Ringkasan dari variasi pemberitaan wacana KB Krama Bali di media sosial *facebook* dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Variasi Pemberitaan Wacana KB Krama Bali di *Facebook*

No	Nama Media	Judul Berita	Jumlah Komentar	Relevansi Komentar (%)
1	Bali Post	Gubernur Koster Minta Kampanye KB Dua Anak Distop	154	58,44
2	Nusa Bali	Jaga Kelestarian Budaya, Koster Gagas KB 4 Anak di Bali	4	75

3	Berita Bali	Koster: Targetkanlah 4 anak Agar Nyoman dan Ketut Juga Kebagian Tempat	6	50
		Stop Kampanye 2 Anak, Koster: Menjaga Warisan Leluhur Vs Kacamata Pengendalian Penduduk	11	36,36
		Koster: Targetkanlah 4 anak Agar Nyoman dan Ketut Juga Kebagian Tempat	120	50,83
		Pemprov Bali Akan Gencarkan Sosialisasi KB Krama Bali Anjurkan 4 Anak	137	59,85
		Tren Demografi Krama Bali Turun, Putri Koster Gaungkan KB 4 Anak	73	57,53
4	Metro Bali	Demi Kelestarian Budaya, Koster Gagas KB 4 Anak di Bali	84	50
		Sebatas Imbauan, Ketua DPRD Bali Nilai Wacana Koster Soal KB 4 Anak Tak Bisa Jadi Program	72	30,5

Sumber: Analisis Data Primer, 2019

Pada media masa *online Nusa Bali* yang diposting pada 16 Maret 2018 (sebelum pemilihan gubernur Bali 2018), judul berita yang dimuat adalah: “*Jaga Kelestarian Budaya, Koster Gagas KB 4 Anak di Bali*”. Postingan ini sangat sedikit mendapat tanggapan warganet, yakni hanya sebanyak 4 komentar, dan dari jumlah itu hanya 3 komentar (75%) yang memiliki relevansi dengan topik yang diangkat. Pada media masa online *Metro Bali*, berita terkait KB Krama Bali diposting sebanyak 2 kali di *facebook* yang semuanya sebelum pemilihan Gubernur Bali 2018, masing-masing dengan judul berita: “*Demi Kelestarian Budaya, Koster Gagas KB 4 Anak di Bali*”, dengan 84 komentar yang 42 komentar (50%) di antaranya memiliki relevansi dengan topik yang diangkat; dan postingan berikutnya berjudul “*Sebatas Imbauan, Ketua DPRD Bali Nilai Wacana Koster Soal KB 4 Anak Tak Bisa Jadi Program*” dengan 72 komentar dan hanya 22 komentar (30,5%) yang memiliki relevansi dengan topik yang diangkat.

Postingan media masa *online* terkait KB Krama Bali di *facebook* dilakukan setelah pemilihan Gubernur Bali Tahun 2018, dilakukan oleh media *Bali Post* dan media *Berita Bali*. Media *Bali Post* memposting berita terkait KB Krama Bali pada 26 November 2018 dengan judul: “*Gubernur Koster Minta Kampanye KB Dua Anak Distop*”. Postingan ini mendapatkan 154 komentar warganet yang 90 di antaranya (58,4%) memiliki relevansi dengan topik berita yang diangkat.

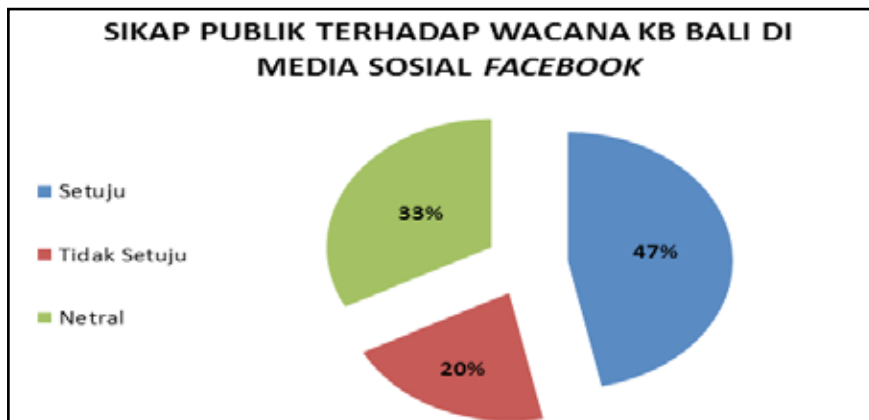
Media masa *online* yang paling sering memviralkan wacana KB Krama Bali di *facebook* adalah *Berita Bali*. Media ini memposting berita tersebut semuanya dilakukan setelah pemilihan Gubernur Bali tahun 2018. Judul-judul berita beserta jumlah komentar dari postingan media *Berita Bali* diantaranya sebagai berikut: 1) “*Stop Kampanye 2 Anak, Koster: Menjaga Warisan Leluhur Vs Kacamata Pengendalian Penduduk*” diposting pada 28 November 2018, dengan jumlah komentar sebanyak 11 dan hanya 4 di antaranya (36,4%) yang relevan dengan topik; 2) “*Tren Demografi Krama Bali Turun, Putri Koster Gaungkan KB 4 Anak*”, diposting pada 26 juni 2019 dengan jumlah komentar sebanyak 73 komentar, 42 komentar (57,5%) diantaranya relevan dengan topik; 3) “*Pemprov Bali Akan Gencarkan Sosialisasi KB Krama Bali Anjurkan 4 Anak*”, diposting pada 28 juni 2019 dengan 137 komentar yang 82 komentar (59,8%) relevan dengan topik; 4) Media *Berita Bali* memposting 2 kali dengan judul dan waktu yang sama, namun jumlah komentar yang berbeda yaitu “*Koster: Targetkanlah 4 anak Agar Nyoman dan Ketut Juga Kebagian Tempat*” sama-sama diposting pada 29 juni 2019. Komentar pada postingan pertama hanya 6 komentar, 3 diantaranya (50%) sesuai topik, dan jumlah komentar pada postingan kedua mencapai 120 komentar, 61 komentar (50,8%) diantaranya relevan dengan topik yang diangkat.

Apabila ditelisik lebih dalam, isi berita yang dimuat seluruh media masa *online* tersebut secara keseluruhan adalah menyerukan agar Krama/Warga Bali untuk melestarikan salah satu warisan leluhur, yakni KB versi Bali dengan empat anaknya (Wayan, Made, Nyoman, dan Ketut). Seruan tersebut ternyata ditanggapi beragam oleh warganet di media sosial *facebook*. Terdapat variasi jumlah komentar pada setiap postingan yang dilakukan masing-masing

media masa *online*. Terjadinya variasi jumlah komentar pada masing-masing media diindikasikan terjadi karena jumlah pengikut pada laman media *online* bersangkutan di *facebook* yang berbeda-beda, daya tarik judul berita yang ditampilkan, waktu pemostingian berita, dan motivasi orang itu sendiri dalam memberikan komentar untuk dapat mengekspresikan dirinya di media sosial. Seperti apa yang disampaikan Mc Gurk (2014), warganet akan tersambung dan terikat dengan suatu postingan di media sosial jika terdapat sesuatu yang berarti di dalam postingan bagi mereka. Santoso (2017) juga menyatakan hal serupa, bahwa konten/isi dan waktu pemostingian sesuatu di media sosial berpengaruh terhadap *Online Engagement* (like dan komentar) dari para warganet.

### 3.2 Sikap Warganet Terhadap Wacana KB Krama Bali di Facebook

Sesuai dengan batasan yang telah dibuat, respon warganet terhadap wacana KB Krama Bali di media sosial *facebook* dikelompokkan menjadi 3, yaitu setuju, netral, dan tidak setuju. Dari penelitian atas empat media masa *online* yang dikaji, terdapat 661 komentar, 349 komentar diantaranya (52,06%) yang relevan dengan topik yang diangkat. Hanya dari komentar-komentar yang relevan dengan topiklah yang selanjutnya dianalisis untuk mengetahui persepsi warganet terkait wacana KB Krama Bali. Secara keseluruhan, sikap warganet terhadap wacana KB Krama Bali disajikan pada Grafik 2.

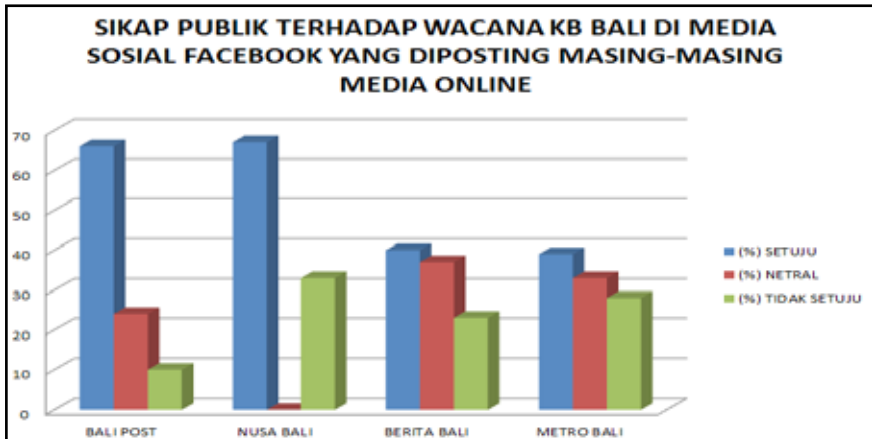


Grafik 2. Tingkat Keberterimaan Warganet Terhadap Wacana KB Krama Bali

Dari Grafik 2 di atas terlihat bahwa tingkat keberterimaan warganet terhadap wacana KB Krama Bali menunjukkan perbedaan yang tidak berarti antara mereka yang setuju, netral, dan tidak setuju. Walau demikian, terlihat bahwa sebagian besar warganet setuju akan program KB Krama Bali, diikuti sikap yang memilih netral, dan paling sedikit warganet yang menyatakan tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa hampir sebagian dari warganet cukup antusias akan adanya program KB Krama Bali. Keantusiasan warganet di media sosial akan Program KB Krama Bali ternyata tidak sejalan dengan pendapat ekonom Bali yang juga pemerhati masalah kependudukan. Rimbawan (2018) dalam artikelnya, mengupas KB Krama Bali dari perspektif ekonomi baik mikro maupun makro. Dalam pemikirannya, menyatakan bahwa dengan memiliki anak yang banyak justru akan menjadi beban bagi keluarga bersangkutan dan juga beban bagi pemerintah. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) harus diarahkan pada peningkatan kualitas, bukan kuantitas. SDM yang berkualitas akan lebih produktif sehingga berpotensi memperoleh penghasilan yang lebih banyak. Pembangunan dalam bidang lainnya lebih tergantung pada SDM dengan teknologi dan ilmu pengetahuannya (Becker, Murphy, dan Tamura, 1993) Dengan demikian, jeratan kemiskinan akan semakin menjauh, Bali dan Indonesia pada umumnya akan mampu bersanding dengan Negara-negara maju lainnya. Tradisi atau budaya lokal, semestinya tidak tabu untuk berubah, tetapi tetap memperhatikan perkembangan zaman. Biarkan Nyoman dan Ketut eksis sebagai lembaran sejarah.

Bagaimanapun pendapat ahli, warganet memiliki penilaiannya sendiri yang dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Pada era yang serba terbuka seperti saat ini, warganet terang-terangan menyatakan sesuatu termasuk jumlah anak yang diinginkan yang merupakan hak mutlak dari seseorang. Sejalan dengan hal itu, eksistensi kebudayaan yang sudah diterima secara turun temurun dirasa bisa terjaga. Namun demikian perlu ditelusuri lebih mendalam, bahwa warganet yang pro/setuju dengan program ini apakah memang riil murni untuk ikut melestarikan budaya, atau memang ada sesuatu

yang diinginkan dibalik sikap setuju yang ditunjukkan. Begitu pula sikap netral maupun tidak setuju bisa tercerminkan dari harapan yang diinginkan. Sikap yang ditunjukkan warganet bisa saja berubah apabila harapan yang diinginkan tidak terpenuhi. Sikap warganet terhadap wacana KB Krama Bali di masing-masing media *online* dapat dilihat pada Grafik 3 berikut.



Grafik 3. Tingkat Keberterimaan Warganet Terhadap Wacana KB Krama Bali di Masing-Masing Media *Online*

Grafik 3 di atas menunjukkan bahwa terdapat variasi tingkat keberterimaan warganet terhadap wacana KB Krama Bali di masing-masing media *online* yang diposting di media sosial *facebook*. Tingkat keberterimaan warganet terhadap wacana KB Krama Bali di media *online* Bali Post dan Nusa Bali persentasenya paling banyak disetujui. Pada sisi lainnya, media masa *online* Berita Bali dan Metro Bali memiliki pola keberterimaan yang cukup mirip, yakni didominasi oleh warganet yang setuju, kemudian diikuti oleh sikap netral, dan tidak setuju dengan selisih yang tidak begitu besar. Terdapatnya variasi tingkat keberterimaan warganet diantara media masa *online* yang memposting wacana KB Krama Bali ke media sosial *facebook* sekali lagi tidak dapat dilepaskan terutama dari daya tarik judul berita yang ditampilkan, waktu pemosting berita, dan motivasi warganet dalam memberikan komentar yang menunjukkan eksistensi sikapnya.



### 3.3 Harapan warganet di Facebook terhadap KB Krama Bali

Sikap warganet terhadap wacana KB Krama Bali seperti yang sudah diuraikan di atas, diikuti oleh berbagai harapan yang diinginkan agar wacana yang diangkat memiliki sebuah kepastian. Harapan warganet tidak hanya datang dari pihak yang pro, melainkan juga datang dari warganet yang bersikap netral dan tidak setuju. Secara umum, harapan warganet terhadap wacana KB Krama Bali dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Harapan Warganet terhadap keberlanjutan Wacana KB Krama Bali di Facebook

No	Harapan Publik	Jumlah	%
1	Memberi Insentif	78	22.35
2	Prioritas Program Yang Lain	55	15.76
3	Tidak Ada Harapan Lebih Lanjut	207	59.31
4	Tinjau Lebih Lanjut	1	0.29
5	Memberi Cuti	1	0.29
6	Buat Program Yang Lebih Frontal	1	0.29
7	Berikan Contoh	1	0.29
8	Tidak terbatas wacana	3	0.86
9	Hapus Kampung KB	1	0.29
10	Sinergi dengan program lain	1	0.29
<b>Jumlah</b>		<b>349</b>	<b>100</b>

Sumber: Analisis Data Primer, 2019

Secara keseluruhan terlihat pada Tabel 2 di atas bahwa lebih dari setengah warganet yang memberikan sikapnya terkait wacana KB Krama Bali memilih tidak memberikan harapan lebih lanjut. Hal ini berarti bahwa warganet yang demikian tidak tergoyah akan sikapnya, baik setuju, netral atau tidak setuju terkait wacana KB Krama Bali. Sebagian warganet memilih demikian, tentu didasarkan pertimbangan masing-masing yang perlu ditelusuri lebih lanjut.

Pada bagian selanjutnya warganet menginginkan agar wacana KB Krama Bali yang apabila dijalankan, mereka mendapatkan insentif terutama bagi anak ketiga dan keempat yang bisa ditanggung oleh pemerintah. Seperti apa yang disampaikan oleh salah seorang warganet sebagai berikut:

“Mendukung sih boleh<sup>2</sup> saja, tapi jangan asal mendukung.. kalo gak kuat dan tidak bisa menyesuaikan dgn tuntutan jaman, malah ini bisa menjadi bumerang bagi keluarga... Pemerintah semestinya juga memberikan timbal balik pada keluarga yg mampu memberikan anak ke 3 dan ke 4, misalnya dengan memberikan tunjangan anak..seperti yg dilakukan oleh pemerintah jepang pada keluarga yg memiliki anak...” (Sumber: Akun Facebook Atas Nama Gede Prasetya Aryadiputra, Komentar di Media Berita Bali).

Keinginan warganet untuk mendapatkan insentif sejalan dengan pemikiran Rimbawan (2018). Biaya untuk membesarkan anak untuk “*zaman now*” tidaklah sedikit. Ditengah persaingan yang semakin ketat, lapangan pekerjaan yang semakin susah didapat, kehadiran “Nyoman dan Ketut” di tengah-tengah keluarga Bali justru menjadi beban. Dengan demikian wajarlah, cukup banyak warganet yang berharap akan diberikannya insentif bagi mereka yang menjalankan KB Krama Bali. Di satu sisi, ekonomi mereka terjamin, di sisi lain warisan budaya leluhur tetap terjaga.

Pada bagian selanjutnya, terdapat pula warganet yang berharap agar pemerintah Provinsi Bali saat ini untuk lebih memprioritaskan program-program lainnya yang lebih mendesak. Program-program lain yang dianggap lebih mendesak oleh warganet diantaranya masalah pendidikan, ketenagakerjaan, ekonomi, kesehatan, reklamasi, dan masalah migran (pendatang). Seperti apa yang disampaikan oleh salah seorang warganet sebagai berikut:

“Banyak anak? Lapangan kerja bgmn ? Blm tentu semua SDM bs menciptakan lapangan pekerjaan sendiri....Sekarang saja banyak lulusan SMA yg msh bingung...Mau kuliah...uang kurang Mau kerja, kerja di mana ? Pengangguran semakin bertambah...” (Sumber: Akun Facebook Atas Nama Putu Anik, Komentar di Media Bali Post)

Apa yang disampaikan salah seorang warganet di atas mencerminkan harapannya yang lebih mengarah pada masalah ketenagakerjaan untuk dituntaskan terlebih dahulu. Sesuai dengan tabel 2, harapan-harapan yang lain juga ada, namun dengan persentase yang sangat kecil.

Harapan warganet yang disajikan pada tabel 2 diatas berasal dari sikap mereka yang berbeda-beda. Untuk itu, data terkait harapan dan sikap warganet terhadap wacana KB Bali disajikan pada tabel 3 berikut.

Tabel 3. Persepsi (Sikap dan Harapan) Warganet Terhadap keberlanjutan Wacana KB Krama Bali di *Facebook*

No	Harapan	Sikap						Jumlah
		Setuju	%	Netral	%	Tidak Setuju	%	
1	Memberi Insentif Prioritas	43	26.38	33	28.95	2	2.78	78
2	Program Yang Lain	9	5.52	26	22.81	20	27.78	55
3	Tidak Ada Harapan Lebih Lanjut	107	65.64	50	43.86	50	69.44	207
4	Tinjau Lebih Lanjut	0	0.00	1	0.88	0	0.00	1
5	Memberi Cuti	1	0.61	0	0.00	0	0.00	1
6	Buat Program Yang Lebih Frontal	1	0.61	0	0.00	0	0.00	1
7	Berikan Contoh	0	0.00	1	0.88	0	0.00	1
8	Tidak terbatas wacana	0	0.00	3	2.63	0	0.00	3
9	Hapus Kampung KB	1	0.61	0	0.00	0	0.00	1
10	Sinergi dengan program lain	1	0.61	0	0.00	0	0.00	1
<b>Jumlah</b>		<b>163</b>	<b>100</b>	<b>114</b>	<b>100</b>	<b>72</b>	<b>100</b>	<b>349</b>

Sumber: Analisis Data Primer, 2019

Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa, dari warganet yang tidak memiliki harapan lebih lanjut terkait wacana KB Krama Bali secara relatif didominasi oleh publik yang memiliki sikap tidak setuju dan publik yang memiliki sikap yang setuju terhadap KB Krama Bali. Hal ini menunjukkan sikap yang sudah pasti dari warganet. Mereka yang bersikap tidak setuju dan tidak memiliki harapan lebih lanjut terkait wacana ini memandang bahwa dengan banyaknya memiliki anak, akan menjadi beban yang sangat tinggi terutama

di bidang ekonomi. Anak dipandang sebagai “*cost*” yang justru akan mempersulit perekonomian rumah tangga mereka. Pada sisi lainnya, warganet yang bersikap setuju dan tidak memiliki harapan lebih lanjut terkait wacana ini, menempatkan nilai-nilai tradisi dan eksistensi kebudayaan Bali sebagai hal yang utama. Mereka merasa bahwa, hanya merekalah yang dapat menjaga eksistensi nilai-nilai tradisi dan kebudayaan Bali, bukan orang lain (pendatang/migran). Untuk itu, wacana yang dimunculkan mendapat dukungan yang sangat tinggi tanpa disertai syarat.

Pada bagian lainnya, warganet yang memiliki harapan untuk mendapatkan insentif jika wacana ini berubah menjadi program didominasi oleh warganet yang bersikap netral dan yang bersikap setuju. Sikap warganet yang netral saat ini bisa akan berubah menjadi mendukung wacana KB Krama Bali apabila diberikan insentif, sebaliknya sikap warganet yang semula setuju dengan wacana KB Krama Bali bisa jadi akan berubah menjadi netral dan bahkan tidak setuju ketika wacana ini berubah menjadi program dan dalam realisasinya tidak ada insentif untuk mereka yang ber-KB Bali. Hal ini menunjukkan bahwa penempatan nilai budaya dan kepentingan ekonomi dapat dikatakan pada posisi berimbang. Di satu sisi mereka sangat ingin berkontribusi terhadap ajegnya nilai-nilai tradisi leluhur (KB Krama Bali), di sisi lainnya mereka mempertimbangkan segala biaya yang dikeluarkan untuk membesarkan anak. Untuk itu, mereka sangat berharap akan adanya insentif dari pemerintah demi *survivenya* tradisi leluhur.

Pada bagian selanjutnya yang secara absolut harapan warganet juga cukup banyak adalah berharap untuk lebih memprioritaskan program yang lainnya. Harapan ini terutama didukung oleh warganet yang bersikap tidak setuju dan netral terhadap wacana yang ada. Mereka yang tidak setuju terhadap wacana yang ada, lebih menaruh harapan agar pemerintah lebih fokus terhadap kompleksitas permasalahan yang dihadapi Bali saat ini, seperti masalah pendidikan, ketenagakerjaan, ekonomi, kesehatan, migran (pendatang), hingga masalah reklamasi yang belum ada kejelasan. Sementara itu, warganet yang memilih netral dan menaruh harapan

untuk lebih fokus pada program yang lain bisa diartikan bahwa di satu sisi mereka memandang KB Krama Bali adalah hal yang penting, namun tidak menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan saat ini. Akan lebih bijaksana jikalau pemerintah oleh kelompok ini membuat program-program yang memang diperlukan saat ini oleh masyarakat Bali. Secara keseluruhan, dapat diketahui bahwa begitu banyak dan bervariasinya harapan dan sikap warganet terhadap wacana KB Krama Bali. Pemerintah Provinsi Bali diharapkan memperhatikan opini-opini ini sekalipun berada di dunia maya. Apa yang diutarakan di dunia maya melalui perantara media sosial *facebook* merupakan curahan isi hati dari warganet yang perlu mendapatkan pertimbangan lebih lanjut.

#### 4. Penutup

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan terkait wacana KB Krama Bali yang di-*share* pada media sosial *facebook* oleh berbagai media masa *online* sebagai berikut:

Terdapat variasi pemberitaan wacana KB Krama Bali di media sosial *facebook* oleh empat media masa *online* yang dikaji. Variasi tersebut dilihat dari judul berita yang ditampilkan dan intensitas pemberitaannya. Media masa *online* yang intensitas pemberitaannya terendah adalah *Bali Post* dan *Nusa Bali*, sementara media masa *online* yang intensitas pemberitaannya tertinggi adalah *Berita Bali*. Bervariasinya pemberitaan wacana KB Krama Bali di media sosial *facebook* tidak dapat dilepaskan dari kebijakan internal organisasi media dan pengaruh eksternal media itu sendiri. Dari variasi pemberitaan yang ada juga memunculkan jumlah komentar warganet yang juga beragam. Secara total, jumlah komentar yang ada sebanyak 661 komentar, 349 di antaranya (52,79%) relevan dengan topik yang diangkat. Dari media masa *online* yang ada, jumlah komentar terbanyak ada pada media *Bali Post*, sementara jumlah komentar paling sedikit ada pada media *Nusa Bali*. Relevansi komentar terhadap topik KB Krama Bali tertinggi ada pada media *Nusa Bali* (75%), dan terendah ada pada media *Metro Bali* (30,5%). Beragamnya jumlah komentar pada masing-masing media masa

*online* di media sosial *facebook* sekiranya dipengaruhi oleh jumlah pengikut pada laman media *online* bersangkutan di *facebook*, daya tarik judul berita yang ditampilkan, waktu pemostingian berita, dan motivasi orang itu sendiri dalam memberikan komentar.

Sikap warganet di media sosial *facebook* terhadap wacana KB Krama Bali menunjukkan perbedaan yang tidak berarti antara mereka yang setuju, netral, dan tidak setuju. Walau demikian, terlihat bahwa sebagian besar warganet setuju akan program KB Krama Bali, diikuti sikap yang memilih netral, dan paling sedikit warganet yang menyatakan tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa hampir sebagian dari warganet cukup antusias akan adanya KB Krama Bali. Sikap warganet yang setuju dengan KB Krama Bali terutama ada pada media masa *online Bali Post* dan *Nusa Bali*. Keantusiasan warganet terhadap KB Krama Bali menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya Bali yang dianut memiliki peranan yang lebih tinggi/penting dibandingkan dengan nilai-nilai lainnya terkait kepemilikan anak.

Harapan warganet di media sosial *facebook* terhadap wacana KB Krama Bali cukup bervariasi, namun yang mencolok hanya 3 hal yaitu tidak ada harapan lebih lanjut, pemberian insentif, dan prioritas pada program yang lain. Warganet yang tidak memiliki harapan lebih lanjut terkait wacana ini menunjukkan sikapnya yang sudah pasti, terutama mereka yang memilih tidak setuju dan mereka yang memilih setuju. Hal ini menunjukkan bahwa warganet yang tidak setuju dengan KB Krama Bali dan tidak memiliki harapan lebih lanjut memandangi anak sebagai “*cost*”, beban ekonomi menjadi kendala. Sebaliknya, mereka yang setuju dan tidak memiliki harapan lebih lanjut memandangi anak sebagai “*benefit*”, beban ekonomi tidak menjadi masalah dan nilai-nilai budaya Bali sebagai warisan leluhur adalah hal yang utama. Warganet yang berharap agar diberikan insentif ketika wacana ini berubah menjadi sebuah program didominasi oleh mereka yang bersikap netral dan yang bersikap setuju. Sikap warganet yang netral saat ini bisa akan berubah menjadi mendukung wacana KB Krama Bali apabila diberikan insentif, sebaliknya sikap warganet yang semula

setuju dengan wacana KB Krama Bali bisa jadi akan berubah menjadi netral dan bahkan tidak setuju ketika wacana ini berubah menjadi program dan dalam realisasinya tidak ada insentif untuk mereka. Hal ini menunjukkan bahwa penempatan nilai budaya dan kepentingan ekonomi dapat dikatakan pada posisi berimbang. Harapan warganet yang lain agar lebih memprioritaskan program yang lain lebih banyak berasal dari warganet yang bersikap tidak setuju dan netral terhadap wacana yang ada. Mereka yang tidak setuju terhadap wacana yang ada, lebih menaruh harapan agar pemerintah lebih fokus terhadap kompleksitas permasalahan yang dihadapi Bali saat ini. Sementara itu, warganet yang memilih netral dan menaruh harapan untuk lebih fokus pada program yang lain bisa diartikan bahwa di satu sisi mereka memandang KB Bali adalah hal yang penting, namun tidak menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan saat ini.

## Daftar Pustaka

- Adji, Danu. 2019. 7 Media Sosial Yang Paling Banyak Digunakan di Indonesia. Tersedia Pada <https://www.masterseo.id/media-sosial-di-indonesia.html> (diakses pada 4 Oktober 2019)
- Becker, G; K.M. Murphy and R.F.Tamura. 1993. *Human Capital, Fertility, and Economic Growth*, in Becker,G (ed), *Human Capital: Theoretical and Empirical Analysis, With a Special References to Education*. 3<sup>rd</sup> ed.. Chicago,IL: Chicago University Press
- Handayani, Lestari; Suharmiati; Iswari Hariastuti; Choirum Latifah, 2012. *Peningkatan Informasi Tentang KB: Hak Kesehatan Reproduksi Yang Perlu Diperhatikan Oleh Program Pelayanan Keluarga Berencana*. Buletin Penelitian Sistem Kesehatan. Vol. 15 No. 3 Juli 2012, pp. 289–297
- Herman Kurniawan, Rasyika Nurul, Rahmat Hidayat. 2017. “Perilaku Akseptor Dalam Memilih Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Di Poskesdes Anuta Singgani Kecamatan Mantikulore Kota Palu”, *Jurnal Preventif*, Volume 8 Nomor 1, April 2017, pp. 39-45
- Hull, Terence H. 2010. *Redefining Family Planning Through Decentralization* (Tersedia Dalam Buku *Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi*, Halaman 73-95). Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan

Instruksi Gubernur Bali Nomor 1545 Tahun 2019 Tentang Sosialisasi Program Keluarga Berencana (KB) Krama Bali.

Krisdinanto, Nanang. 2014. "Anomali dan Teori Hirarki Pengaruh terhadap Isi Media", *Komunikatif, Jurnal Ilmiah Komunikasi*, Vol 3 Nomor 1, pp. 1-18

Manuaba, Ida Bagus Gde. 1998. *Ilmu kebidanan, penyakit kandungan & keluarga berencana untuk pendidikan bidan*. Egc.

McGurk, S. 2014. *What is Social Media Engagment and Why it Matters for your Business*. Tersedia pada <http://blog.fusionfarm.com/what-is-social-media-engagment-and-why-it-matters-for-your-business>. (diakses pada 3 Oktober 2019)

Pertiwi, Wahyunanda Kusuma. 2019. *Facebook Jadi Medsos Paling Digemari di Indonesia*. Tersedia pada [www.tekno.kompas.com](http://www.tekno.kompas.com). (diakses pada 23 Agustus 2019)

Pradana, Yudha. 2017. "Peranan Media Sosial Dalam Pengembangan Melek Politik Mahasiswa", *Jurnal Civics*, Volume 14, Nomor 2 Edisi Oktober 2017, pp. 139-14

Rahadi, Dedi Rianto. 2017. "Perilaku Pengguna Dan Informasi Hoax Di Media Sosial", *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan*, Vol 5 No 1. pp. 58-70

Ratnamulyani, Ike Atikah dan Beddy Iriawan Maksudi. 2018. *Peran Media Sosial Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Dikalangan Pelajar Di Kabupaten Bogor*. Sosiohumaniora-Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora. Vol. 20, No. 2, Edisi Juli 2018, pp.154 – 161

Rimbawan, Nyoman Dayuh. 2018. *Zaman Now: Masih Relevankah KB Bali?* Artikel Koalisi Kependudukan. Denpasar: BKKBN

Rohim, Sabrur. 2016. "Argumen Program Keluarga Berencana (KB) Dalam Islam", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 1 Nomor 2, pp. 47-70

Santoso Amanda P, Imam Baihaqi, dan Satria F.Persada. 2017. "Pengaruh Konten Post Instagram terhadap Online Engagement: Studi Kasus pada Lima MerekPakaian Wanita", *JURNAL SAINS DAN SENI ITS*, Vol. 6, No. 1, pp. 50-54

Sarmita, I. Made. 2017. "Refleksi Kritis Kondisi Demografi Indonesia: Antara Bonus Dan Bencana Demografi", *Media Komunikasi Geografi*,



Volume 18 Nomor 1, Edisi Juni 2017, pp. 66-76

Sutinah. 2017. *Partisipasi Laki-Laki Dalam Program Keluarga Berencana Di Era Masyarakat Postmodern*. Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Vol. 30, No. 3, pp. 289-299

Watie, Errika Dwi Setya. 2011. "Komunikasi dan Media Sosial", *THE MESSENGER*, Volume III, Nomor 1, Edisi Juli 2011, pp. 69-74.

UNDP. 2018. *Human Development Indices and Indicators 2018 Statistical Update*. New York: UN